

PENUNTASAN BUTA AKSARA LEWAT MODEL AIDDA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Oleh :

AGUSSANI

*Fakultas Ilmu Sosial dan Politik universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
Jl. Kapt. Muktar Basri No. 3 Medan*

Abstract

The functional literacy often some educated targets from adult people especially the residents of prisons who dream something beautiful and glow, but it can't come true and they do not want to be the part of that beautiful dream. The height of illiteracy number becomes something gripped, whereas, this activity has been started since the beginning of independence with any approach model in 1995, the functional literacy has been attempted and skill used nowadays. The remedy of education quality is really need through development and implement the learning models which are active, creative/ innovative, effective, please, contextual, actual, concrete, and mean to development and social life which also includes the residents of prisons. Based on this experience, the research attempt to develop AIDDA model, which is spreading an idea based on the problem that has been faced by the client with organize an affective communication between tutor and learner, so that it will create a transparency and solving learner problem which get the target. AIDDA model is an abbreviation from attention, interest, desire, decision, in simple way, AIDDA can be imagined as follows : in order to consumer candidate of our product/ service dispose to just know or want to play attention to what we offer so that he interest to our offering, and then he has a will to use our product/ service and finally, he makes a decision and use the product/ service that we have been offered before.

Key word : the functional literacy, AIDDA, Education model

I. Pendahuluan

Salah satu tujuan nasional di dalam pembukaan Undang-undang Dasar RI tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat diupayakan melalui pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan utama dan hak asasi setiap manusia. Namun, masih tampak pula kesenjangan pendidikan karena pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya merata, sehingga masih banyak ditemukan warga yang menyandang buta aksara. Akibatnya, hal tersebut juga berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi dan social masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan berbagai elemen dunia pendidikan untuk memberantas buta aksara.

Upaya untuk mewujudkan manusia yang berkualitas, handal dan komperatif merupakan tantangan utama pendidikan. Konsekuensinya, seluruh kelompok usia, jenis kelamin, harus memperoleh layanan pendidikan merata. Namun pendidikan formal memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dari warga masyarakat. Pemerintah telah melakukan

berbagai upaya untuk mengatasi hal ini. Salah satunya melalui program pengentasan buta aksara. Gerakan Nasional percepatan sasaran prioritas penduduk buta aksara usia 15-44 tahun.

Program keaksaraan fungsional yang telah lama dikenal yakni sejak pertengahan tahun 1960an, dan merupakan konsep yang sangat berpengaruh dalam membangun pendidikan melalui program keaksaraan. Pesona ide tersebut sangat kuat dan tersebar luas. Banyak pihak sangat peduli terhadap ide tersebut antara lain ; pendidikan orang dewasa, para ahli pembangunan ekonomi, pekerja pembangunan desa, lembaga-lembaga penyebar inovasi, para perencana dan pelaksana pada lembaga-lembaga Internasional tampaknya semuanya sangat peduli dengan keaksaraan fungsional ; ide dibalik itu sepertinya adalah bahwa keaaksaraan dapat mempunyai fungsi atau peran kebangkitan pembangunan social ekonomi suatu masyarakat. Sementara itu para pekerja keaksaraan fungsional terutama yang bekerja di proyek-proyek yang disponsori oleh Unesco melakukan

eksperimentasi, dan telah menjual konsep tersebut beserta temuan-temuannya.

Munculnya konsep keaksaraan fungsional sangat mengesankan, tetapi tidak berjalan mulus untuk gerakan keaksaraan dinegara sedang berkembang. Konsep keaksaraan fungsional ini memakan waktu panjang untuk bangkit dari frustrasi dan kegagalan para pekerja keaksaraan yang seringkali menghadapi para sasaran didik orang dewasa yang memimpikan sesuatu kehidupan yang indah, yang terang benderang tetapi tidak terwujud dan mereka tidak ingin menjadi bagian dari mimpi indah tersebut. Mereka tidak lagi secara sukarela untuk belajar membaca dan menulis. Mereka tidak lagi mikir apakah keaksaraan itu gak asasi manusia atau bukan. Bagi mereka yang sudah pernah belajar membaca dan menulis, mereka juga tidak tahu mau melakukan apa dengan kecakapan barunya tersebut, atau setelah memperoleh skill linguistik, mau apa ? konsep baru yang disebut keaksaraan fungsional menjanjikan akan memecahkan masalah masalah klasik dan masalah yang sulit yaitu motivasi peserta didik dan secara bersamaan menghubungkan keaksaraan dengan ekonomi, social dan aspirasi politik di Negara sedang berkembang.

Buta huruf secara sederhana biasa diartikan sebagai ketidak mampuan seseorang untuk mengenal huruf latin (membaca) dan angka (menghitung). Buta huruf selalu diasosiasikan dengan keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, dan simbol-simbol ketakberdayaan lainnya, bahkan angka buta huruf menjadi salah satu indikator dalam mengukur Human Development Index (HDI) suatu Negara. Oleh karena itu, fenomena buta huruf ini menjadi salah satu isu utama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bahkan salah satu butir pokok kesepakatan Dakar (The Dakar Framework for Action) yang sudah menjadi kesepakatan dunia dalam hal pengembangan sumber daya manusia adalah **“Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa”**.

Masih tingginya angka buta huruf ini tentunya merupakan sesuatu yang memiriskan, padahal kegiatan ini sudah dimulai sejak awal kemerdekaan dengan berbagai model pendekatan, tahun 1995 diuji cobakan model keaksaraan Fungsional yang digunakan sampai saat ini. Pemberantasan buta huruf ini didukung oleh ketersediaan ketenagaan pendidikan non formal yang bisa sebagai agen percepatan penuntasan pemberantasan buta huruf.

Sebagai bentuk keprihatinan akan masih tingginya angka buta huruf, pada tahun 2005 pemerintah mencanangkan program pemberantasan Buta Aksara Intensif dengan berusaha melibatkan sebanyak mungkin komponen bangsa. Targetnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam rencana strategis Depdiknas yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu menurunkan angka buta huruf usia 15 tahun ke atas hingga 5% pada tahun 2009. Untuk menunjang pencapaian tersebut, tahun 2006 pemerintah menyiapkan dana sekitar 1 triliun rupiah.

Dengan dukungan dana yang relatif besar, pertanyaannya kemudian adalah “Apakah kegiatan pemberantasan buta huruf itu akan berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat?” Hal ini patut menjadi renungan, karena secara anatomi penyandang buta huruf kurang lebih sama dan sebangun dengan masyarakat miskin itu sendiri. “Apakah ia merupakan akar persoalan atau hanya dampak dari sebuah kebijakan ?”

Pertanyaan ini penting diajukan agar kita tidak terjebak pada pendekatan yang bersifat parsial dan memakai indikator kuantitatif dalam menilai keberhasilan program pemberantasan buta huruf, seolah-olah persoalan buta adalah persoalan yang berdiri sendiri, terpisah dari persoalan-persoalan lainnya yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga pendekatan yang dilakukan sangat teknis (member kemampuan calistungdasi) dan sektoral (hanya melibatkan instansi teknis Departemen pendidikan Nasional). Dengan model ini, tidak mampu secara tuntas menyelesaikan persoalan yang ada, karena yang ditangani hanyalah dampak, bukan akar persoalan.

“Lalu apa sebenarnya yang menjadi akar persoalan masih tingginya angka buta huruf ?” pertanyaan ini harus dikemukakan dan dikaji sebagai entry point penuntas permasalahan yang ada. Secara tipologi, masyarakat buta huruf adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud sangat jelas pada aspek ekonomi, social, asset, akses, politik, budaya, dll, tetapi bukan berarti mereka adalah kumpulan masyarakat yang tak memiliki potensi sama sekali. Kalau kita mau menganalisis secara jernih, akar persoalan sebenarnya adalah masih terpeliharanya perilaku ketidakadilan, baik itu ketidakadilan yang diperlihatkan oleh Negara (Pemerintah), maupun secara horizontal yang diperankan oleh masyarakat itu sendiri.

Program buta aksara yang dilaksanakan saat ini belum sepenuhnya menyentuh berbagai masyarakat, khususnya masyarakat marginal yang berada dipedesaan. Hal itu karena sebagian masyarakat buta aksara menganggap program ini tidak siap dipakai untuk modal hidup mereka. Fenomena ini lebih diperparah dengan telah mengakarnya karakter melayu yaitu budaya malu pada sebagian besar masyarakat mayoritas etnis Melayu. Jika kita mengadakan program pemberantasan buta aksara di masyarakat hasilnya kurang begitu memuaskan. Hal ini dikarenakan masyarakat kita masih mempunyai budaya malu yang tinggi untuk maju. Malu bila dikatakan memiliki kekurangan (buta aksara) dengan usia yang boleh kita bilang sudah mendekati senja. Konsekuensinya pemberantasan buta aksara yang berkembang menjadi keaksaraan fungsional kurang mendapat respon oleh sebagian masyarakat, sehingga tidak terjadi penurunan angka yang signifikan terhadap jumlahnya (Alesyanti, 2008).

Model pembelajaran yang ada saat ini belum mampu memberikan kontribusi yang efektif terhadap peningkatan minat warga belajar dalam program pembelajaran. Model pembelajaran yang diterapkan baru saat ini lebih menitikberatkan pada pendidikan keterampilan hidup berdasarkan potensi dan kebutuhan warga belajarnya sedangkan pendidikan regulernya menjadi faktor pendukung.

Untuk menjawab permasalahan di atas peneliti mencoba menggunakan model AIDDA

sebagai model dalam pemberantasan buta aksara di lapas kelas II b Lubuk Pakam. Tahap awal yang perlu kita pahami sebelum masuk kepada inti permasalahan adalah berkurangnya minat masyarakat khususnya penghuni lapas dalam mengikuti program pemberantasan buta aksara karena disebabkan budaya malu dan perekonomian yang lemah. Tahap ini perlu diperkenalkan dengan maksud supaya terdapat keseragaman persepsi terhadap melemahnya minat masyarakat untuk mengikuti program pemberantasan buta aksara.

II. KAJIAN TEORI

1. Pemberantasan Buta Aksara

Aksara adalah jendela dunia, pintu bagi sebuah pendidikan. Namun Indonesia masih saja bersibuk-sibuk dengan persoalan pemberantasan buta aksara. Padahal upaya pemberantasannya sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan tahun 1945. Tapi kenapa buta aksara tak kunjung terberantas. Apa sesungguhnya masalah yang terjadi ? peran aksara sangat krusial dan sangat besar pula sumbangannya bagi index pembangunan manusia (Human Development Index/ HDI) tak terbantahkan.

Berdasarkan data pada tahun 2004, mayoritas penduduk Indonesia atau sebanyak 90,4 persen sudah melek huruf. Artinya, masih tersisa 9,6% penduduk yang masih buta aksara dan itu berjumlah sekitar atau 14,8 juta orang, tersebar dari usia 15 tahun ke atas. Pada tahun 2005, program pemberantasan buta aksara hanya berhasil mencapai target yang belum tercapai sebanyak 900 ribu akan ditambahkan (carried over) ke target 2006 yang 1,5 juta orang.

Program penurunan buta aksara telah dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal, namun perlu adanya penanganan yang lebih sinergis agar dapat diperoleh hasil yang maksimal, karena penurunan buta aksara tidak maksimal jika buta aksara baru terus bertambah.

Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah, salah satunya adalah upaya peningkatan anggaran pendidikan untuk dapat mencapai 20% dari APBN dan APBD sesuai amanat UUD 45 dan UU No.20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional. Tapi semua kebijakan akan lebih berhasil jika peran serta

masyarakat dalam pembangunan pendidikan lebih ditingkatkan, termasuk peran dan fungsi komite sekolah, perguruan tinggi dan dewan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat yang mencakup proses perencanaan pembangunan pendidikan.

Paradigm untuk pendidikan keaksaraan secara global saat ini mengalami perluasan makna. Pendidikan keaksaraan saat ini bukan hanya berfokus pada masalah kesenjangan kecakapan membaca, menulis dan berhitung, tetapi hal itu juga menyangkut kecakapan-kecakapan tertentu dan penguasaannya keterampilan praktis yang kontekstual dan selaras dengan perubahan peradaban manusia yang melahirkan konsekuensi logis tentang adanya tuntutan-tuntutan baru terhadap setiap individu.

Problem seperti ini akan menciptakan kesenjangan yang hanya bias diembatin oleh pendidikan, khususnya pendidikan non formal. Pendidikan keaksaraan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dunia pendidikan non formal ini pun tidak terlepas dari tugas dan fungsinya yaitu sebagai pelengkap (suplemen), penambah (komplemen), dan pengganti (substitusi) yang tercipta dari suatu system pendidikan secara menyeluruh.

Jumlah angka buta aksara penduduk Indonesia hingga akhir tahun 2009 masih sekitar 5,3 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 8,7 juta jiwa. Saat ini persentase buta aksara di Sumatra Utara mencapai 3,8 % dari 2,4 juta jumlah penduduk yang masuk usia produktif. Dari 3,8 persen buta aksara itu, ungkap Bahrum Syah, terbanyak di Delisedang dan Nias. Mereka tinggal di daerah pegunungan dan pantai, didominasi kaum perempuan berusia di atas 50 tahun (harian global, 2010).

2. Model Pembelajaran

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Jadi model pembelajaran cenderung preskriptif, yang relatif sulit dibedakan dengan strategi pembelajaran. *An instructional strategy is a method for delivering instruction that is intended to help student*

achieve a learning objective (Burden & Byrd, 1999:85).

Selain memperhatikan rasional teoritik, tujuan, dan hasil yang ingin dicapai, model pembelajaran memiliki lima unsur dasar (Joyce & Weil (1980), yaitu (1) *syntax*, yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran, (2) *social system*, adalah suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran, (3) *principles of reaction*, menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan merespon siswa, (4) *support system*, segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran, dan (5) *instructional and nurturant effect*—hasil yang di peroleh langsung berdasarkan tujuan yang disasar (*instructional effects*) dan hasil belajar di luar yang disasar (*nurturaneffects*).

Di dalam pembelajaran keaksaraan fungsional, peranan tutor sangat menunjang kelancaran pembelajaran untuk warga belajar. Pada umumnya sasaran dari program keaksaraan fungsional terdiri dari masyarakat orang dewasa yang belum melek aksara. Selama ini program pembelajaran keaksaraan fungsional tersebut telah berjalan, tetapi hasilnya kurang maksimal. Hal itu terjadi akibat pemilihan metode pembelajaran yang masih konvensional seperti halnya persekolahan.

Seharusnya, strategi pembelajaran keaksaraan fungsional adalah pembelajaran orang dewasa. Metode pembelajaran tersebut dijalankan melalui belajar dari pengalaman sendiri (*self learning experience*) yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam menganalisis dan mengembangkan pengetahuan tentang kehidupan setempat dan sumber daya masyarakat. Sasaran melek aksara biasanya terdapat di daerah pedalaman yang mayoritas penduduknya beragama islam dan sering melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan misalnya pengajian. Oleh karena itu, dari kegiatan tersebut mereka sudah dapat membaca tulisan dengan huruf arab dan huruf pegon, tetapi belum dapat membaca latin.

Aspek metode pembelajaran sangat penting mendapat perhatian karena tiga alasan. Pertama, metode pembelajaran merupakan variabel manipulatif, artinya setiap tutor memiliki

kebebasan untuk memilih dan menggunakan berbagai metode pengajar sesuai dengan karakteristik materi pembelajarannya. Lagi pula, struktur isi pelajaran merupakan variable pembelajaran di luar kontrol tutor karena merupakan wewenang pemerintah. Kedua, metode pembelajaran memiliki fungsi sebagai instrument yang membantu atau memudahkan warga belajar dalam memperoleh sejumlah pengalaman belajar.

Materi pembelajaran yang memiliki tingkat kesulitan akan terasa mudah jika tutor mampu meramu dan menyajikan dengan menerapkan metodel pembelajaran yang menarik bagi warga belajar. Ketiga, pengembangan metode pembelajaran dalam konteks peningkatan mutu perolehan hasil belajar perlu diupayakan secara terus-menerus dan bersifat komperensif karena proses pembelajaran merupakan factor determinan terhadap mutu hasil belajar. Hal ini makin menarik untuk diperhatikan seiring dengan kuatnya tuntutan terhadap mutu pendidikan nonformal.

3. Jenis Model Pembelajaran

a. Model Pemrosesan

Model-model yang berorientasi pada kemampuan pemrosesan informasi dari siswa dan cara memperbaiki kemampuan dalam menguasai informasi, merujuk pada cara orang menangani stimulus dari lingkungannya, mengorganisasikan data, menginderaai masalah, melahirkan konsep dan pemecahan masalah, dan menggunakan simbol verbal dan non-verbal. Model model yang termasuk kedalam rumpun ini antara lain adalah; Model berfikir (*inquiry Training model*), Model berfikir yang dikembangkan Hilda Taba, dirancang terutama untuk pengembangan proses mental indukatif dan penalaran akademik atau pembentukan teori, namun kapasitasnya berguna pula untuk pengembangan personal dan sosial.

b. Model Personal

Model-model yang termasuk ke dalam rumpun personal berorientasi pada pengembangan diri individu, model-model ini menkankan proses pembentukan individu dalam mengorganisasikan realitasnya yang unik. Focus pengembangan diri berkesan menekankan pada

pembinaan emosional antara individu dalam hubungan produktif dengan lingkungan hingga diharapkan menghasilkan hubungan interpersonal yang lebih kaya dan kemampuan pemrosesan yang lebih efektif lagi.

Terliput ke dalam rumpun ini adalah; pengajaran Non-Direktif (*Non-directive teaching*), pelatihan kesadaran (*awraness training*), sinektic (*synectics*), system konseptual (*Conceptual System*) dan pertemuan kelas (*Classroom Meeting*).

c. Model Interaksi Sosial

Model-model pembelajaran yang termasuk rumpun interaksi social, menekankan hubungan antara individu dengan masyarakat dan dengan individu lainnya. Focus model ini terletak pada proses di mana dengan proses ini realitas dinegosiasi memberikan propirtas pada perbaikan kemampuan individu untuk berhubungan dengan yang lainnya, bergelut dengan proses demokratik dan bekerja secara produktif dalam masyarakat.

Termasuk kedalam rumpun model ini, antara lain : investigasi kelompok (*Group Investigation*), Inkuiri Sosial (*social inquiry*), Metode Laboratorium (*Laboratory Method*), Yurisprudensial (*Yurisprudential*), Bermain peran (*Role Playing*) dan simulasi Sosial (*Sosial Simulation*).

d. Model Behavioral

Model-model yang termasuk ke dalam rumpun behavioural berpijak pada landasan teoritis yang sama, yakni teori tingkah laku (*Behavioral Theory*). Dalam penerapannya, model ini banyak menggunakan istilah lain seperti teori belajar, teori belajar sosial, modifikasi tingkah laku, dan terapi tingkah laku

Ciri pokoknya menekankan pada usaha mengubah tingkah laku teramati ketimbang struktur psikologis yang mendasarinya dan tingkah laku yang tidak teramatinya. Model ini mendasarkan pada prinsip kontrol stimulus dan penguatan (*Stimulus Control and Reinforcement*). Lebih dari model lainnya model behavioral memiliki keterpakaian yang luas dan teruji keefektifitannya pada aneka tujuan seperti Pendidikan, pelatihan, tingkah laku, interpersonal dan pengobatan.

Tercakup dalam model ini, antara lain : Manajemen Kontingensi (Contingency Management), Kontrol Diri (Self Control), Relaksasi (Relaxation), Reduksi stress (Stress Reducation), Pelatihan Asertif (Assertive Training), Desentisasi (Desensitization) dan Pelatihan Langsung (Direct Training).

e. Model Inkuiri

Model Inkuiri adalah salah satu model pembelajaran yang memfokuskan kepada pengembangan kemampuan siswa dalam berfikir reflektif kritis, dan kreatif. Inkuiri adalah salah satu model pembelajaran yang dipandang modern yang dapat dipergunakan pada berbagai jenjang Pendidikan, mulai dari tingkat Pendidikan dasar hingga menengah.

Pelaksanaan inkuiri di dalam pembelajaran Pengetahuan Sosial di rasionalisasi pada pandangan dasar bahwa dalam model pembelajaran tersebut, siswa didorong untuk mencari dan mendapatkan informasi melalui kegiatan belajar mandiri.

Model inkuiri pada hakekatnya merupakan penerapan metode ilmiah khususnya di lapangan Sains, namun dapat dilakukan terhadap berbagai pemecahan problem sosial. Savage Amstrong mengemukakan bahwa model tersebut secara luas dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Pengembangan strategi pembelajaran dengan model inkuiri sangat sesuai dengan karakteristik materi Pendidikan Sosial yang bertujuan mengembangkan tanggung jawab individu dan kemampuan berpartisipasi aktif baik sebagai anggota masyarakat dan warganegara.

f. Model Pembelajaran VCT

VCT (Value Clarification Technique) adalah salah satu Teknik pembelajaran yang dapat memenuhi tujuan pencapaian Pendidikan nilai. Model pembelajaran VCT merupakan sebuah cara bagaimana menanamkan dan menggali/mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari diri peserta didik. Karena itu, pada prosesnya VCT berfungsi untuk : a) mengukur dan mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai; b) membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik yang positif maupun yang negatif untuk kemudian dibina

kearah peningkatan atau pembetulannya; c) menanamkan suatu nilai kepada siswa melalui cara yang rasional dan diterima siswa sebagai milik pribadinya. Model pembelajaran VCT dimaksudkan untuk melatih dan membina siswa tentang bagaimana cara menilai, mengambil keputusan terhadap suatu nilai umum untuk kemudian dilaksanakannya sebagai warga masyarakat.

g. Model bermain peta

Keterampilan menggunakan dan menafsirkan peta dan globe merupakan salah satu tujuan penting dalam pembelajaran Pengetahuan Sosial. Keterampilan menginterpretasikan peta maupun globe perlu dilakukan peserta didik secara fungsional.

Peta dan globe memberikan manfaat, yaitu : a) siswa dapat memperoleh gambaran mengenai bentuk, besar, batas-batas suatu daerah; b) memperoleh pengertian yang lebih jelas mengenai istilah-istilah geografis seperti : pulau, selat, benua, dan sebagainya; c) memahami peta dan globe, di perlukan beberapa syarat yaitu : a) arah, siswa mengerti tentang cara menentukan tempat di bumi seperti arah mata angin, meridian, parallel, belahan timur dan barat; b) skala, merupakan model atau gambar yang lebih kecil dari keadaan sebenarnya; c) lambing-lambang, merupakan symbol-simbol yang mudah dibaca tanpa ada keterangan lain; d) warna, menggunakan berbagai warna untuk menyatakan hal-hal tertentu misalnya : laut, beda tinggi darat, daerah tertentu, dsb.

h. Model Role Playing

Role Playing adalah salah satu model pembelajaran yang perlu menjadi pengalaman belajar peserta didik, terutama dalam konteks pembelajaran Pengetahuan Sosial dan Kewarganegaraan didalamnya. Sebagai langkah teknis, Role Playing sendiri tidak jarang menjadi pelengkap kegiatan pembelajaran yang dikembangkan dengan stressing model pendekatan lainnya, seperti inkuiri, ITM, portofolio, dan lainnya.

Secara komprehensif makna penggunaan role playing antara lain, 1) untuk menghayati sesuatu hal sebenarnya dalam realitas kehidupan;

2) agar memahami apa yang menjadi sebab dari sesuatu serta bagaimana akibatnya; 3) untuk mempertajam indera dan perasaan siswa terhadap sesuatu; 4) sebagai penyaluran/pelepasan tensi (kelebihan energi psykhis) dan perasaan-perasaan; 5) sebagai alat diagnose keadaan; 6) kearah pembentukan konsep secara pribadi; 7) menggali peran-peran dari pada dalam suatu kehidupan/kejadian/keadaan; 8) menggali dan meneliti nilai-nilai (norma) dan peranan budaya dalam kehidupan; 9) membantu siswa dalam mengklasifikasikan (memperincikan) pola berfikir, berbuat, dan keterampilannya dalam membuat/mengambil keputusan menurut caranya sendiri; 10) membina siswa dalam kemampuan memecahkan masalah.

4. Model AIDDA

Efektivitas penyampaian materi pembelajaran dapat ditentukan oleh banyak hal. Salah satu diantaranya, adalah efektivitas penyampaian pesan dan materi dengan cara menari perhatian warga belajar. Upaya perubahan dapat berjalan efektif jika tercipta suasana komunikasi dalam proses belajar yang bersifat sukarela, menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti dan ditangkap, temanya menggugah perhatian dan minat karena memberi gambaran akan adanya manfaat atau kerugian langsung bagi peserta komunikasi jika mengikuti atau menolak isi pesan.

Teknik ini dikenal dengan model AIDDA. Untuk kepentingan ini, konsep AIDDA bisa kita terapkan. AIDDA berasal dari singkatan *Attention, Interest, Desire, Decision, and Action* yang bermakna :

- Attention (perhatian)
- Interest (minat)
- Desire (Hasrat/ingin)
- Decision (keputusan)
- Action (Tindakan/kegiatan)

Model AIDDA pada dasarnya sebagai suatu proses pembelajaran yang diawali dengan tahap perhatian (*attention*), yakni bagaimana upaya seorang pendidik/tutor membangkitkan kesadaran warga belajar akan pentingnya membaca, menulis, dan berhitung, kemudian disusul dengan upaya menarik perhatian (*interest*) dan membangkitkan hasrat atau

keinginan (*desire*) warga belajar. Seorang warga belajar yang telah dibangkitkan kesadaran, perhatian dan minatnya terhadap suatu ide perlu didorong untuk mengambil keputusan (*decision*) dan terahir dalam bentuk tindakan (*action*) (canggara, 2008:216).

5. Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam

Lembaga pemasyarakatan Klas II B adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lunuk Pakam dihuni oleh 785 narapidana (data 2009), mempunyai penghuni dengan tingkat Pendidikan berkisar antara Sekolah Dasar 336 orang, SMP 197 orang, SMA/MA 142 orang, sarjana 10 orang dan buta aksara 100 orang.

III. METODE PENELITIAN

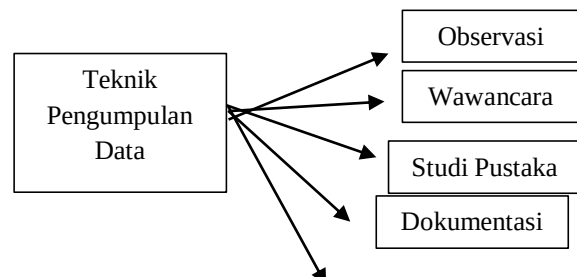
1. Model research dan development

Model penelitian dan pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang dihasilkan. Model yang di gunakan adalah model procedural yaitu model yang bersifat deskriptif, menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Dalam model penelitian dan pengembangan ada 5 tahapan yaitu :

- a. Studi Pendahuluan
 - Studi Perpustakaan
 - Studi empiric
- b. Uji validasi awal
- c. Model validasi awal
- d. Uji validasi model
- e. Perumusan model validasi

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :



Triangulasi

- a. Angket kepada 50 orang narapidana program keaksaraan fungsional tingkat lanjut.
- b. Observasi
 - Dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Apakah ada penurunan pada intensitas kehadiran dari pertemuan pertama kepada pertemuan selanjutnya.
 - Apakah ada minat dan aktifitas mereka dalam proses pembelajaran
- c. wawancara
tipe wawancara yang dilakukan adalah tipe *deep interview* (wawancara tertutup) kepada :
 1. 10 narapidana yang dipilih menjadi responden dari etnis melayu
 2. Kasubsi Resitansi dan Bimbingan kemasyarakatan kelas II B Lubuk Pakam dengan kisi-kisi pertanyaan sesuai dengan indikator yang terdapat dalam variable.
- d. Studi Pustaka
Penelitian mengumpulkan, mengkaji dan menganalisis bahan-bahan tentang pembrantasan buta aksara, kurikulum dan model pendidikan keaksaraan dasar, buku penelitian dan karakteristik budaya Melayu.
- e. Studi Dokumentasi
Dilakukan selama proses penelitian berlangsung.
- f. Triangulasi
Proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai oembanding terhadap data tersebut yang meliputi :
 1. Triangulasi data
 2. Triangulasi pengamat
 3. Triangulasi Teori
 4. Triangulasi metode

3. Populasi

Penelitian dilakukan di lembaga pemasyarakatan yang berada di Sumatra Utara. Untuk sampel penelitian dipilih lembaga pemasyarakatan kelas II B lubuk pakam dengan populasi 100 orang buta aksara laki-laki berusia antara 15-60 tahun yang berbeda pada tingkat keaksaraan dasar, mandiri dan lanjut.

4. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari peneliti (Ridwan, 2006). Sampel yang dipilih semua narapidana yang buta aksara tingkat lanjut sebanyak 50 orang. Dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih harus dari warga belajar buta aksara. Adapun alasan pemilihan 50 orang adalah :

- Narapidana pada kelompok aksara tingkat lanjut.
Pada tingkat ini responden sudah mempunyai kemampuan untuk dapat menuliskan apa yang di dengar dan mampu membaca sekalipun terbata-bata sehingga akan lebih membantu penelitian dalam pengambilan data.
- Narapidana Etnis Melayu
Sebagian besar etnis melayu mempunyai tingkat malu yang tinggi untuk mengakui ketidak mampuan mereka terhadap membaca menulis dan berhitung
- Narapidana yang tidak bekerja (sebelum menjadi penghuni lapas)
Untuk dapat melihat pengaruh buta aksara terhadap kemakmuran maka dipilih responden yang tidak bekerja.
- Rentang umurnya 20-40 tahun.
Pada rentang umur diatas diperkirakan responden sudah mampu memahami dan tanggap dengan pertanyaan yang akan diberikan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data susenas tahun 2003 menunjukkan bahwa factor ekonomi (tidak ada biaya atau bekerja mencari nafkah) menjadi alasan paling utama seseorang tidak bersekolah, putus sekolah, dan atau tidak melanjutkan sekolah. Hal ini sangat terkait dengan tidak terbukanya akses

secara merata dan berkeadilan bagi masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang layak yang nota bene dijamin oleh undang-undang, yang kemudian juga diikuti oleh tidak memadainya perlindungan/ jaminan Negara terhadap masyarakat miskin untuk menyelenggarakan hidupnya secara layak, termasuk memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu perlu sebuah komitmen kuat dalam bentuk kebijakan radikal dan berkeadilan pro poor, yang tidak hanya menempatkan kemiskinan dan buta huruf menjadi isu untuk menaikkan mata anggaran, tetapi menjadikan gerakan memberantasan buta huruf intensif sebagai sebuah gerakan yang bermakna pembebasan, penumbuhan capital social, dan penghargaan terhadap kemanusiaan.

Mengintergrasikan kegiatan pembrantasan buta huruf dengan kegiatan penumbuhan produktifitas ekonomi masyarakat sebenarnya sudah dilakukan, tapi kelemahannya adalah: masih sangat tidak proporsional, artinya bahwa kemampuan calistungdasi (membaca, menulis, berhitung, dan berdiskusi) masih sangat dominan daripada porsi penumbuhan kecakapan personal, kecakapan social, maupun kecakapan vokasional; dan sifatnya pun masih sangat sektoral, seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Nasional. Lembaga-lembaga masyarakat dan perguruan tinggi yang seharusnya juga berkompeten terhadap program ini tidak berupaya keras mengatasi persoalan yang sangat krusial dalam pembangunan sumber daya manusia.

Strategi pelaksanaan GNP-PWB/ PBA (Gerakan Nasional Percepatan Pembrantasan Buta Aksara – penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun/ Pemberantasan Buta Aksara), bahwa harus ada perbaikan mutu pendidikan melalui pengembangan dan mengimplementasikan model-model pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif/ inovatif, efektif, menyenangkan, kontekstual, actual, konkret, dan bermakna bagi pengembangan dan kehidupan masyarakat termasuk juga warga penghuni lembaga pemasyarakatan.

Menjawab tantangan ini pemerintah melalui UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 14, sangat jelas mengatur hak-hak

seorang narapidana selama menghuni lembaga pemasyarakatan yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hokum, atau orang tertentu lainnya.
- h. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

Dari berbagai komponen yang disebut dalam UU No.12 tahun 1995 tersebut, aspek pendidikan mendapat prioritas utama untuk direalisasikan. Dengan bekal pendidikan tersebut warga penghuni lembaga pemasyarakatan siap untuk terjun ke tengah masyarakat.

Rincian dari bidang pendidikan ini meliputi pendidikan non formal dan informal. Kegiatan ini telah dilaksanakan di semua lembaga pemasyarakatan yang ada di Sumatera Utara yaitu :

LP Pancur Batu, LP Tanjung pura, LP Tanjung Balai, LP Rantau perapat, LP Kabanjahe, LP Labuhan Bilik, LP Kota Pinang, LP Labuhan Deli, LP Pangkalan Brandan, LP Tebing Tinggi Deli, LP Lubuk Pakam, LP Sidikalang, LP Binjai, LP Gn. Sitoli, LP Pulau Tebo, LP Padang Sidempuan, LP Kotanopan, LP Gunung Tua, LP Tarutung, LP Siborong-borong, LP Pangururan, LP Sipirok, LP Penyambungan, LP Barus, LP Sibuhuan, LP Natal, LP Medan. Adapun program pendidikan nonformal dan informal yang dilaksanakan di LP Sumatra Utara dapat dilihat pada table 1 :

Tabel 1. Program Pendidikan di Lembaga
Permasyarakatan Sumatera Utara

No	Nama LP	Kegiatan
1	Tanjung Gusta Medan	• Pemberantasan buta aksara • Paket A,B, dan C • Ketrampilan kerajinan • Ketrampilan pembuatan tas sablon
2	Kelas II B Lubuk Pakam	• pemberantasan buta aksara • paket A,B, dan C • ketrampilan servis HP • ketrampilan listrik • kaligrafi
3	Kelas II B Binjai	• pemberantasan buta aksara • sablon • pertenakan • kursus menjahit

Dari berbagai program yang tertera di atas pelaksanaannya juga direalisasikan di lembaga pemasyarakatan kelas II B lubuk pakam kabupaten Deli Serdang. Perbedaan yang prinsipil antara pelaksanaan program di lembaga pemasyarakatan lainnya adalah : (1) Adanya Struktur dan penanggung jawab bidang-bidang program; (2) karakteristik warga lembaga pemasyarakatan yang berbeda meliputi pendidikan, budaya, agama, sehingga setiap program kegiatan selalu ada pesertanya.

Berdasarkan informasi dari lembaga pemasyarakatan Lubuk Pakam, angka buta aksara penghuni lembaga pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada table 2 :

Tabel 2. Data Buta Aksara diKlas II B
Lubuk Pakam

	Tahun		
	2007	2008	2009

Penghuni LP	680	725	789
Buta Aksara	102	80	50
Yang diajarkan	-.	60	50

Berdasarkan dari data diatas diketahui bahwa pelaksanaan pemberantasan buta aksara tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Hal ini terbentur oleh adanya karakter budaya malu dan tidak jelasnya harapan yang akan diperoleh warga belajar dari keikutsertaan mereka terhadap program ini. Berangkat dari hal inilah peneliti mencoba mengembangkan model AIDDA, yaitu penyebaran suatu ide berangkat dari permasalahan yang dihadapi klien dengan menata suatu komunikasi yang efektif antara tutor dan warga belajar, sehingga tercipta suatu transparansi dan penyelesaian persoalan warga belajar yang mengenai sasaran. Model AIDDA merupakan kependekan dari Attention, Interest, Desire, Decision, dan Action. Secara sederhana AIDDA dapat digambarkan sebagai berikut : agar calon konsumen produk/jasa kita bersedia untuk sekedar tahu ataupun mau memperhatikan apa yang kita tawarkan sehingga ia tertarik terhadap penawaran kita, kemudian ia mempunyai keinginan untuk menggunakan produk / jasa kita dan akhirnya ia membuat keputusan dan menggunakan produk/jasa yang kita tawarkan.

AIDDA digunakan agar terjadi efektivitas penyampaian pesan dengan cara menarik perhatian komunikasi. Kondisi yang harus dipenuhi jika kita menginginkan agar suatu pesan membangkitkan tanggapan yang kita kehendaki, dengan memperhatikan

- a) pesan harus dirancang dan disampaikan sehingga menarik
- b) pesan harus menggunakan lembaga-lembaga tertuju kepada pengalaman antara komunikator dan komunikan, sehingga dimengerti.
- c) Pesan harus membangkitkan kebutuhan probadi komunikan
- d) Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan komunikan (Cangara 2008)

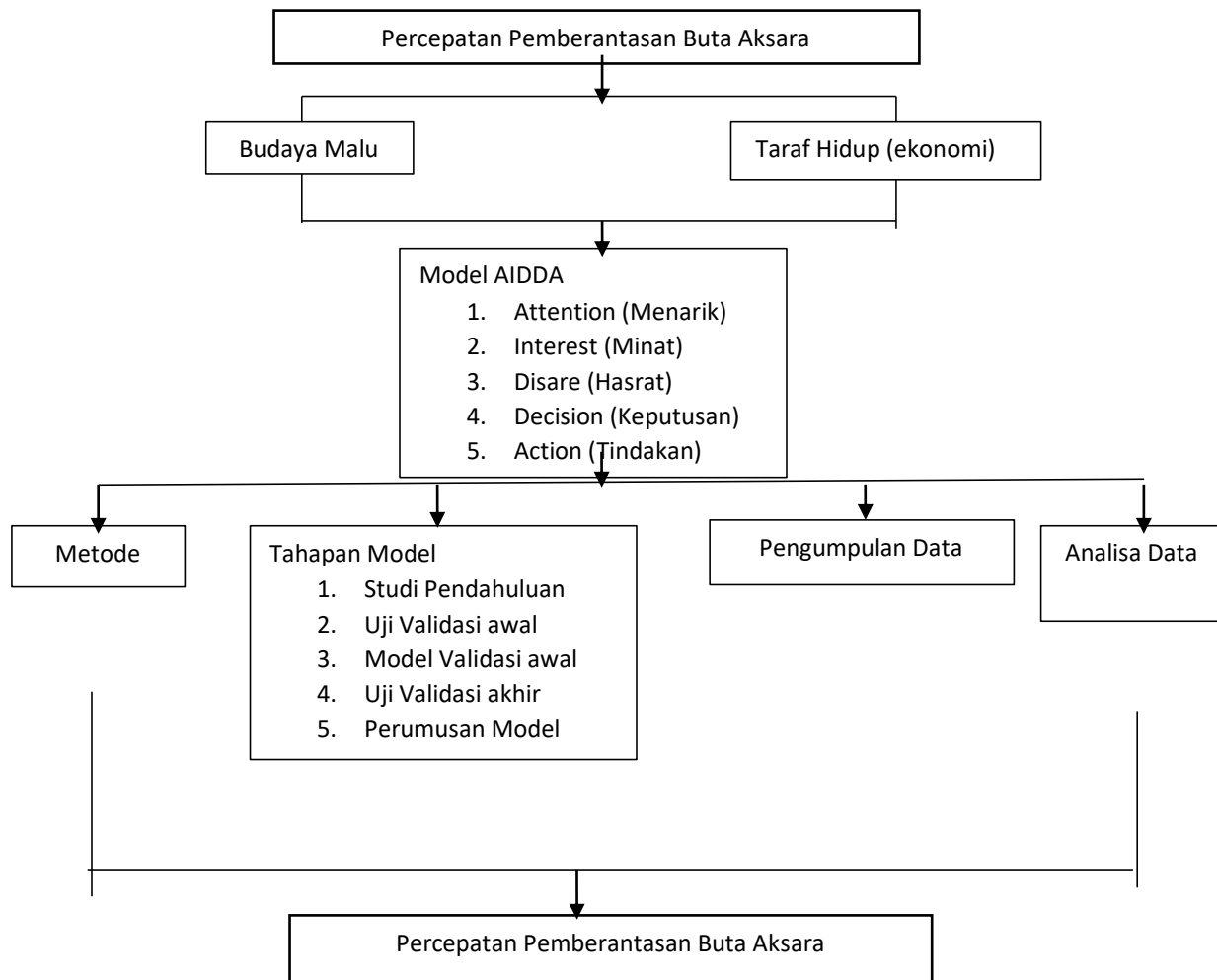
Dengan menggunakan model AIDDA ini diharapkan dapat menggiring keinginan warga belajar sehingga menyampingkan budaya malu, melalui empat langkah pesan AIDDA,

seterusnya pesan ini ditutup dengan suatu proses pembelajaran, sebagai modal hidup narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pemberian ketrampilan hidup ini menumbuhkan minat, hasrat dan akhirnya warga belajar melakukan tindakan dalam arti kata mau mendukung program buta aksara. Program pemberantasan buta aksara berbasis kecakapan hidup ini, dinamai dengan kecakapan fungsional.

Keterbelakangan disektor ekonomi dan pendidikan, tidak membuat efek pembelajaran pada mereka. Kondisi narapidana tidak menunjukkan kemauan untuk berinovasi bagi

penataan hidup mereka. Sehingga kegiatan buta aksara yang kita tawarkan yang berbasis pengembangan potensi, minat dan bakat dianggap hanya sebatas seremonial.

Berdasarkan dari hasil survey di atas dan bertitik tolak pada hasil dan rekomendasi penelitian maka dikembangkan model AIDDA untuk membangkitkan perhatian dan keinginan warga buta aksara yang berada di lembaga pemasyarakatan kelas II B Lubuk Pakam untuk aktif dalam proses pembelajaran seperti terlihat pada gambar 2 berikut :



V. KESIMPULAN

Konsep model pembelajaran AIDDA merupakan kependekan dari Attention, Interest, Desire, Decision, dan Action. Yang berbasis pada kecakapan fungsional. Model AIDDA pada dasarnya sebagai suatu proses pembelajaran yang diawali dengan tahap perhatian (attention), yakni bagaimana upaya seorang pendidik/tutor membangkitkan kesadaran warga belajar akan pentingnya membaca, menulis dan berhitung, kemudian disusul dengan upaya menarik minat (interest), dan membangkitkan hasrat atau keinginan (desire) warga belajar. Seorang warga belajar yang telah dibangkitkan kesadaran, perhatian dan minatnya terhadap suatu ide perlu didorong untuk mengambil keputusan (decision) berdasarkan kepada kebutuhan, minat, kecakapan fungsional, potensi sumber daya alam, usaha dan jasa. Dengan keputusan yang diambil tersebut warga belajar akan dapat melakukan tindakan (action) yang terbaik untuk dirinya.

Dengan pembelajaran model AIDDA akan mampu : (1) melahirkan suatu model sosialisasi yang mampu untuk meningkatkan perhatian, minat dan keinginan warga belajar akan pentingnya kemampuan membaca, menulis dan berhitung bagi diri mereka sehingga warga belajar merasakan bahwa kemampuan calistung merupakan suatu keharusan dan tuntutan dalam hidup; (2) menghasilkan warga belajar yang siap pakai dengan memberikan kecakapan fungsional yang disesuaikan dengan minat, mata pencaharian, potensi sumber daya alam pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, usaha produk kerajinan, pertukangan dan jasa. Melatih dan menyediakan tenaga

pelajar/ tutor, bahan belajar seperti buku buku/ modul modul.

DAFTAR PUSTAKA

Alesyanti (2008). Laporan Akhir Pemberdayaan Warga Buta Aksara di Lapas Kls II B Lubuk Pakam. Medan : UMSU.

Arikunto, S. (1997). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi revisi V. Rineka Cipta. Jakarta.

Burden, P. R, & Byrd, D. M. (1996). Method foor effective teaching, second edition. Boston: Allyn and Bacon

Cangara, Hafled. (2008). Penyuluhan Hukum, Sebuah Tinjauan dari perspektif Perencanaan Komunikasi Bandung : UNPAD

Emzir. (2008). Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif. Rajawali Press. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Harian Global. (2010). 3,8 Persen Masyarakat Sumut Buta Aksara – Anak Jalanan Berpotensi Buta Aksara. <http://www.harian-global.com/persen-masyarakat-sumut-buta-aksara-anak-jalanan-berpotensi-buta-aksara-catid-56-edukasi&itemid-63>

Joyce, B, & Well, M, (1990). Modal of teaching New Jersey:Prentice-Hall, Inc

Soesillo, R (1991), Kriminologi Suatu Pengantar Bandung : Oramedia